



# KLIPING

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Sumber Berita: **RADAR TARAKAN**

TANGGAL:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																											v				

BULAN:

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
		v									

TAHUN

2015
------

HALAMAN

2b
----

# Serahkan Laporan Keuangan Ke BPKRI

## Yasen TP : Semoga Mendapat Opini WTP

**TARAKAN**—Deadline penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) tinggal menghitung hari. Namun baru dua pemerintah daerah dari Kalimantan Utara yang menyerahkan, yakni Nunukan dan Malinau.

Siang kemarin (27/3), jajaran Pemerintah Kabupaten (Pembkab) Malinau seperti Bupati, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Kepala Inspektorat, Kabag Keuangan, Kabag Hu-

mas dan Protokol serta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malinau bertandang ke kantor BPKRI perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) di jalan Pulau Irian.

Kedatangan para pemangku kebijakan ini guna menyerahkan laporan keuangan penggunaan anggaran tahun 2014 kepada BPKRI. Yang selanjutnya akan segera dilakukan audit guna mendapatkan predikat opini.

Dalam sambutannya, Bupati Malinau Dr Yansen TP M.Si menjelaskan sebagai gambaran umum pada tahun 2014, anggaran Pemkab Malinau sebesar Rp 2,4 triliun dengan realisasi sebe-

sar Rp 2,085 triliun. Sesuai dengan aturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang pengelolaan anggaran daerah. Kepala daerah wajib melaksanakan penyerahan laporan pengelolaan keuangan kepada BPKRI paling lambat setelah 3 bulan tahun anggaran berakhir.

"Pada 2013 lalu, kami menyampaikan laporan keuangan pada 28 Maret. Dan tahun ini, kami berusaha menyampaikan dengan tepat waktu seperti yang diamanatkan oleh mendagri tersebut. Dengan segala kemampuan dan sumber daya yang ada, serta kondisi Kabupaten Malinau, kami berusaha memenuhi apa

yang tertuang dalam permendagri tersebut. Sehingga hari ini dapat hadir dengan seluruh jajaran di kantor BPKRI perwakilan Kaltara," ungkapnya.

"Semoga apa yang kami sampaikan (Laporan Keuangan, Red) mengalamai peningkatan penilaian yang baik terhadap hasil yang telah dijalankan," harapnya. Seperti diketahui, pengelolaan keuangan daerah Malinau pada 2012 dan 2013 mendapatkan predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPKRI Kaltim. Ini berdasarkan konsekuensi capaian kinerja yang dimiliki oleh jajaran Pemkab.

"Kami sadari adanya berbagai

kelemahan baik menyangkut teknis dan pengelolaan keuangan. Harapan kami dengan pengelolaan keuangan yang semakin baik dari tahun ke tahun dan pendekatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tahun ini hasilnya lebih meningkat," kata Yansen.

Menurutnya, tujuan utama dari laporan keuangan tersebut bukan predikat opini. Akan tetapi, bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan kerja keras dan bantuan dari stakeholder, Yansen tak lupa memberi-

kan apresiasi kepada BPKRI beserta tim yang telah memberikan pembinaan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pengelolaan keuangan daerah Malinau.

Ketua DPRD Malinau, Wempi W. Mawa mengungkapkan, sebelum pemda menyampaikan laporan keuangan ke BPKRI. Terlebih dahulu laporan yang sama telah diserahkan kepada pihaknya. "Dalam tahapan penyusunan beberapa bulan lalu, pemda telah memberikan laporan tentang penyelenggaraan keuangan kepada DPRD. Dan apa yang disampaikan ini adalah hal yang sudah menjadi tugas dan fungsi kami," ungkapnya. (aan)



# KLIPING

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Sumber Berita: **RADAR TARAKAN**

TANGGAL:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																											v				

BULAN:

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
		v									

TAHUN

2015

HALAMAN

2b



AGUSSALAM GANI/RADAR TARAKAN

**LAPORAN KEUANGAN :** Bupati Malinau Yansen TP didampingi Ketua DPRD Malinau Wempi W. Mawa saat menyerahkan laporan keuangan Pemerintah Malinau kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara), Ade Iwan Rusmana, di kantor BPKRI Perwakilan Kalimantan Utara di Tarakan, Jumat (27/3).